

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BAWASLU DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI  
PENGAWASAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL: STUDI KASUS PADA  
PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017**

**RIFQI NAUFAL PUTRA**

**ABSTRAK**

Unsur SARA yang terjadi dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta sudah menjadi rahasia umum bahwa isu tersebut dijadikan komoditas politik yang digunakan masing-masing calon untuk kebutuhan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam kasus ujaran kebencian di media sosial khususnya saat Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan model kualitatif eksplanasi dalam menjelaskan kasus yang penulis angkat dalam kaitannya dalam pola pengawasan aktor-aktor yang terkait. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka guna mendapatkan pemaparan yang kompleks dan peka. Teori yang penulis gunakan untuk menjadi landasan berpikir dalam menganalisa kasus ini adalah implementasi kebijakan yang dituliskan oleh Grindle. Analisis yang penulis lakukan menekankan pada konteks pola relasi yang terjadi antar aktor yang terlibat dalam pengawasan saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 serta kaitannya dengan temuan data yang penulis dapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mengawasi kasus ujaran kebencian adalah menggalakan sosialisasi dengan berbagai pemangku kepentingan, menjalin kemitraan dengan instansi pemerintahan lainnya, dan membuka kanal pelaporan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melaporkan temuan kasus ujaran kebencian. Selain itu terdapat hambatan bagi Bawaslu untuk melaksanakan hal tersebut, yakni maraknya penggunaan akun anonim dalam ujaran kebencian di media sosial, terpolarisasinya kondisi sosial politik pada saat itu..

**Kata Kunci:** Ujaran kebencian, kampanye politik, implementasi kebijakan

# IMPLEMENTATION OF BAWASLU POLICY IN HANDLING HATE SPEAKING IN SOCIAL MEDIA: A CASE STUDY IN THE 2017 DKI JAKARTA ELECTION

RIFQI NAUFAL PUTRA

## ABSTRACT

*Hate speech that occurred in the DKI Jakarta Pilkada campaign has become an open secret that the issue is used as a political commodity that is used by each candidate for election needs. This study aims to explain the implementation of the Bawaslu policy in carrying out its supervisory function in cases of hate speech on social media, especially during the 2017 DKI Jakarta Regional Head Election. Data collection was carried out by in-depth interviews and literature studies in order to obtain complex and sensitive explanations. The theory that the author uses as a basis for thinking in analyzing this case is the implementation of the policies written by Grindle. The analysis that the author does emphasizes the context of the pattern of relationships that occur between actors involved in supervision during the 2017 DKI Jakarta Pilkada and its relation to the data findings that the authors get. The results showed that the efforts made by Bawaslu in supervising hate speech cases were promoting socialization with various stakeholders, establishing partnerships with other government agencies, and opening the widest possible reporting channels to the public to report findings of hate speech cases. In addition, there are obstacles for Bawaslu to carry out this, namely the widespread use of anonymous accounts in hate speech on social media, and the polarization of socio-political conditions at that time.*

**Keyword:** *Hate speech, political campaign, implementation policy*